



Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Mengatasi Retensi Kelas di Sekolah Menengah Atas

Aegustinawati, Yaya Sunarya*

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, FPBS, Universitas Pendidikan Indonesia

*Corresponding Author. Email: aegustinawati@upi.edu

Abstract: This study aims to analyze the implementation of the Merdeka Curriculum in overcoming class retention. This research used a case study method with a qualitative approach. The informants in the study were teachers and the deputy principal for curriculum at SMA Negeri 1 Tempilang. Data collection techniques were conducted by interview, questionnaire distribution, observation, and documentation. This research data analysis technique used an interactive model analysis, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicated that implementing the Merdeka Curriculum could overcome the problem of class retention. The policy's success in avoiding class retention relied heavily on the realization of planning, implementation, and assessment that prioritized essential principles in the Merdeka Curriculum. Curriculum implementation had to be carried out by referring to various regulations, instructions, and guidelines for implementing the Merdeka Curriculum in terms of planning, implementing learning, and assessing. The success of the Merdeka Curriculum in overcoming class retention required the active role of all components of education, starting from teachers, principals, related institutions, parents, and students.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kurikulum Merdeka dalam mengatasi retensi kelas. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Informan pada penelitian adalah guru dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMA Negeri 1 Tempilang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pendistribusian angket, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka dapat mengatasi masalah retensi kelas. Keberhasilan kebijakan menghindari retensi kelas sangat bertumpu pada terealisasinya perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian yang mengutamakan prinsip-prinsip penting dalam Kurikulum Merdeka. Pengimplementasian kurikulum harus dilakukan dengan merujuk pada berbagai peraturan, petunjuk, dan panduan pelaksanaan Kurikulum Merdeka baik dari segi perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, maupun penilaian. Keberhasilan Kurikulum Merdeka dalam mengatasi retensi kelas sangat membutuhkan peran aktif semua komponen pendidikan mulai dari guru, kepala sekolah, lembaga terkait, orang tua, dan siswa.

Article History

Received: 08-04-2023

Revised: 12-05-2023

Accepted: 09-06-2023

Published: 17-07-2023

Key Words:

Merdeka

Curriculum;

Class Retention.

Sejarah Artikel

Diterima: 08-04-2023

Direvisi: 12-05-2023

Disetujui: 09-06-2023

Diterbitkan: 17-07-2023

Kata Kunci:

Kurikulum Merdeka;

Retensi Kelas.

How to Cite: Aegustinawati, A., & Sunarya, Y. (2023). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Mengatasi Retensi Kelas di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Paedagogy*, 10(3), 759-772. doi:<https://doi.org/10.33394/jp.v10i3.7568>



<https://doi.org/10.33394/jp.v10i3.7568>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pendahuluan

Masalah mengulang kelas atau retensi masih menjadi isu penting dunia pendidikan di Indonesia. Berdasarkan laporan Kemdikbud dalam neraca pendidikan pada tahun 2020, tidak ada satu pun provinsi yang zero retensi. Baik di level sekolah dasar maupun sekolah



menengah masih ditemukan siswa yang tidak naik kelas (Kemdikbud, 2020). Bahkan, angkanya tidak sedikit. Pada jenjang SMA jumlah siswa retensi mencapai 17.015 se-Indonesia. Persentase siswa mengulang kelas di Indonesia disebutkan mencapai 16%. Angka ini 5% lebih tinggi daripada rata-rata persentase siswa mengulang kelas di negara-negara anggota OECD (CNBC Indonesia, 2020).

Perdebatan tentang perlu atau tidaknya memberikan pengalaman tambahan kepada siswa dengan cara mengulang pembelajaran selama satu tahun pelajaran telah berlangsung sepanjang sejarah pendidikan di dunia Barat (Jimerson: 2001). Di satu sisi mengulang kelas dinilai akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan prestasi belajar dari sebelumnya (Fruehwirth et al., 2016). Namun, di sisi lain tidak naik kelas dipandang akan memberikan efek trauma dan sanksi sosial yang tidak sepele (Zhang dan Huang, 2022). Pandangan negatif masyarakat terhadap siswa yang tidak naik kelas memunculkan beban psikologis tersendiri bagi siswa (Hughes et al., 2018). Kebijakan retensi bahkan dipandang dapat menurunkan minat belajar siswa. Alih-alih menjadi solusi untuk meningkatkan kompetensi siswa, pada faktanya retensi justru membuat siswa malas belajar karena merasa harus mengulang-ulang pelajaran. Tinggal kelas juga menyumbang tingginya angka siswa putus sekolah (Eren et al., 2020; Hughes et al., 2018; Owings dan Magliaro, 1998). Siswa yang tinggal kelas cenderung akan merasa frustrasi dan tidak percaya diri. Di saat teman-teman sekelasnya mengeksplorasi pelajaran di kelas baru, siswa yang tidak naik kelas harus beradaptasi dengan siswa di bawah usianya. Pada akhirnya, tidak melanjutkan sekolah dianggap sebagai alternatif solusi. Tak hanya itu, kebijakan retensi kelas juga dinilai merugikan anggaran (Gonzalez-Betancor dan Lopez Puig, 2016; Levin, 2007). Siswa yang tidak naik kelas secara otomatis akan mengulang satu tahun pembelajaran. Hal ini tentu saja akan menambah beban biaya anggaran. Selain itu, terdapat banyak hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa kebijakan retensi kelas tidak memberikan hasil untuk kemajuan siswa (Witmer et al., 2004).

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah. Dalam mengatasi masalah retensi, pemerintah dipandang perlu menetapkan kebijakan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Penyusunan kurikulum yang tepat dan akomodatif adalah salah satu pendekatan yang dapat dipilih untuk mengatasi dilema retensi kelas (Jacobs dan Mantiri, 2022). Kurikulum harus didesain dengan memperhatikan kebutuhan belajar siswa sesuai dengan tahap perkembangannya. Kurikulum perlu disusun agar memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan tanpa harus mengulang satu tahun pelajaran yang sudah dilalui. Siswa yang belum mencapai standar tertentu dalam pembelajaran, hanya perlu mengulang pada standar tersebut (Parker, 2001). Artinya, siswa tidak harus mengulang seluruh pelajaran pada kelas yang sama selama setahun penuh. Berbagai pertimbangan penting ini telah terakomodir dalam Kurikulum Merdeka yang dirilis pemerintah pada tahun 2022.

Kurikulum Merdeka diluncurkan pemerintah dalam rangka percepatan perbaikan pendidikan Indonesia pascapandemi. Keberadaan kurikulum ini sangat diharapkan dapat mengatasi *learning loss* yang terjadi sepanjang pandemi. Kurikulum Merdeka dirancang dengan pendekatan *student centered learning*. Karakteristik utama kurikulum ini terletak pada tiga aspek yakni pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan *soft skills* dan karakter, berfokus pada materi esensial, dan berorientasi pada fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan tahap perkembangan dan kemampuan peserta didik (Kemdikbud, 2022). Karakteristik yang ketiga ini memunculkan capaian pembelajaran berdasarkan fase-fase tertentu, bukan berdasarkan level kelas dan tahun pelajaran. Capaian



pembelajaran yang diklasifikasi berdasarkan fase semacam ini memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk menyelesaikan pembelajaran sesuai kemampuannya tanpa harus tertinggal kelas. Fase awal dalam Kurikulum Merdeka disebut dengan fase fondasi yakni ada pada jenjang PAUD. Fase A dimulai dari kelas I dan II SD. Fase B terdiri atas kelas III dan IV. Fase C dibagi ke dalam kelas V dan VI. Fase D ada pada jenjang SMP (kelas VII hingga IX). Di level SMA capaian pembelajaran dibagi ke dalam dua fase yaitu fase E (kelas X) dan fase F (kelas XI dan XII) (Kemdikbud, 2022).

Penelitian tentang implementasi kurikulum merdeka telah dilakukan sejumlah peneliti. Damayanti dan Muhroji (2022) menemukan bahwa guru sekolah dasar masih kurang memahami pengembangan instrumen pembelajaran tematik Kurikulum Merdeka yang sesuai dengan peraturan. Barlian et al. (2022) mengatakan bahwa Kurikulum Merdeka telah diimplementasikan dengan baik di SDN 244 Guruminda Kota Bandung dilihat dari aspek pembelajaran berbasis proyek, pemanfaatan asesmen diagnostik, serta pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif. Ardianti dan Amalia (2022) menyimpulkan bahwa guru sekolah dasar masih kesulitan dalam menyusun modul ajar, asesmen diagnostik, dan penilaian sumatif. Mardianah (2021) mengungkapkan bahwa pelaksanaan program merdeka belajar di lingkungan madrasah harus didukung dengan kelengkapan administrasi dan manajemen madrasah. Isa et al. (2022) menemukan bahwa peran kepala sekolah sangat penting dalam keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Usaha kepala sekolah memberikan dampak besar bagi pemecahan berbagai permasalahan dalam upaya pengimplementasian Kurikulum Merdeka. Utami et al. (2022) mengatakan bahwa konsep merdeka belajar belum dipahami dengan baik sehingga menjadi kendala dalam program penguatan profil pelajar Pancasila sebagai bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka. Leny (2022) menyebutkan bahwa kendala implementasi Kurikulum Merdeka di level SMK antara lain adalah terbatasnya sarana dan prasarana, sumber buku, serta respons siswa yang cenderung pasif. Qolbiyah (2022) mengatakan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada sekolah kejuruan untuk mengeksplorasi pembelajaran sesuai dengan sarana prasarana yang tersedia serta memberikan kemerdekaan bagi guru untuk menyampaikan materi secara esensial. Ariga (2022) mengatakan bahwa Kurikulum Merdeka di SP/SMK-PK telah memperbaiki dan memulihkan krisis pembelajaran sebagai dampak pandemi. Senada dengan penelitian ini, Vidieyanti et al. (2022) menjelaskan bahwa Kurikulum Merdeka bisa menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterlambatan belajar di masa pandemi. Dalam level perguruan tinggi, penelitian mengenai implementasi Kurikulum Merdeka dilakukan oleh Deak et al. (2022). Dalam penelitian tersebut Deak menyimpulkan bahwa kendala dalam implementasi merdeka belajar di antaranya adalah perbedaan akreditasi perguruan tinggi, ketersediaan dana, serta minimnya sosialisasi. Maghfiroh dan Sholeh (2022) berpendapat bahwa perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap kesiapan sumber daya manusia serta fasilitas dan kebutuhan setiap perguruan tinggi dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Sementara itu, Fahmi et al. (2022) menyebutkan bahwa strategi peningkatan mutu melalui Kurikulum Merdeka di perguruan tinggi swasta telah dilakukan secara mandiri dan terpadu.

Kurikulum Merdeka yang dihadirkan dengan konsep berbeda dari kurikulum sebelumnya dicita-citakan mampu untuk mengatasi problem retensi kelas. Fleksibilitas yang diusung dalam Kurikulum Merdeka dirancang dapat memberikan keleluasaan bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Retensi kelas harus diakui masih menjadi masalah tersendiri di dalam dunia pendidikan. Di satu sisi kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan. Siswa yang berada di satu jenjang pendidikan harus dipastikan memiliki kompetensi yang mumpuni saat dinyatakan berhak naik ke jenjang berikutnya. Namun, di sisi



lain kenyataan bahwa ada siswa yang belum bisa mencapai kompetensi adalah realita yang seringkali tidak bisa dihindari. Memutuskan siswa tidak naik kelas dianggap kebijakan yang merugikan. Siswa yang belum mampu mencapai kompetensi tertentu tidak harus diberi sanksi dengan mengulang seluruh materi pembelajaran dalam satu tahun pelajaran. Siswa selayaknya diberi kesempatan untuk terus naik ke jenjang berikutnya. Namun, keputusan semacam ini tetap harus diiringi dengan kepastian bahwa siswa memiliki kompetensi yang seharusnya dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kurikulum Merdeka dalam mengatasi masalah retensi kelas. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi guru, sekolah, dan pemerintah mengenai hal-hal yang perlu ditingkatkan dan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan dalam penerapan Kurikulum Merdeka khususnya dalam mengatasi masalah retensi kelas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek atau fenomena yang diteliti secara naratif (Anggito dan Setiawan, 2018). Studi kasus merupakan eksplorasi dengan mengumpulkan informasi secara mendalam sehingga dapat mencapai pemahaman mendalam tentang suatu kasus (Fitrah dan Luthfiyah, 2017). Pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang implementasi Kurikulum Merdeka dalam mengatasi masalah retensi kelas di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekolah ini dipilih karena menjadi *pilot project* program sekolah penggerak di Provinsi Bangka Belitung. Sebagai sekolah penggerak, SMA Negeri 1 Tempilang telah menerapkan Kurikulum Merdeka pada siswa kelas X tahun pelajaran 2021/2022. Informan penelitian ini adalah guru dari berbagai bidang mata pelajaran dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMA Negeri 1 Tempilang. Informan guru ada sebanyak 9 orang yang sebagiannya juga menjabat sebagai wali kelas X pada tahun pelajaran 2021/2022. Sampel diambil melalui teknik *snowball sampling*.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, pendistribusian angket, observasi, dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMA Negeri 1 Tempilang. Pemilihan narasumber ditentukan berdasarkan keahlian dan bidang pekerjaan yang dimiliki. Pendistribusian angket dilakukan dengan menggabungkan teknik pertanyaan terbuka dan tertutup. Kedua teknik pertanyaan ini digunakan untuk memperoleh data secara luas dan sistematis. Butir pertanyaan disusun berdasarkan variabel dan subvariabel penelitian. Observasi dokumentasi dilakukan terhadap perangkat pembelajaran dan penilaian yang disiapkan oleh guru. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif dari Miles and Huberman. Aktivitas analisis data dengan model ini terdiri atas tiga kegiatan utama yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan (Winarni, 2018).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemerintah telah menetapkan 2.500 sekolah se-Indonesia untuk menjadi *pilot project* pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2021/2022 (*Kompas*, 2022). Ketika itu masih diberi nama Kurikulum Prototipe (*Republika*, 2023). Sekolah-sekolah yang dipilih merupakan sekolah penggerak. Sehubungan dengan statusnya sebagai sekolah penggerak, SMA Negeri 1 Tempilang menjadi *pilot project* penerapan Kurikulum Merdeka pada siswa kelas X tahun pelajaran 2021/2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Para guru di

SMA Negeri 1 Tempilang sudah mengikuti kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan workshop Kurikulum Merdeka sebelum kurikulum ini diimplementasikan di sekolah tersebut. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, dan workshop dilakukan secara daring. Narasumber sosialisasi, pelatihan, dan workshop berasal dari berbagai unsur dari Kemdikbud RI.

Guru adalah salah satu faktor penting keberhasilan penerapan kurikulum di sekolah. Oleh sebab itu, guru harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas pentingnya dalam proses pembelajaran. Ketentuan di dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa guru harus memiliki empat kompetensi. Satu di antara kompetensi itu adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi ini menuntut guru untuk mampu memfasilitasi proses belajar siswa dengan menyusun program pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, hingga penilaian (Rifma, 2016).



Gambar 1. Kompetensi Pedagogik Guru

Perencanaan pembelajaran oleh para guru dilakukan sesuai prosedur penyusunan program pembelajaran. Selain bekal materi pelatihan dan workshop, sebelum menyusun perencanaan pembelajaran, para guru membaca dan mempelajari berbagai dokumen penting seperti panduan pembelajaran dan asesmen Kurikulum Merdeka yang diterbitkan oleh Kemdikbud melalui laman resmi Kemdikbud. Para guru juga mengakses berbagai informasi terkait Kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar. Dalam Kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajaran dimulai dengan memahami capaian pembelajaran (CP) dalam setiap fase sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dicapai siswa pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran memuat berbagai kompetensi dan materi yang disusun secara komprehensif dan disajikan secara naratif (pusatinformasi.guru, 2023). Rancangan capaian pembelajaran merujuk kepada teori belajar konstruktivisme dan pendekatan kurikulum *understanding by design* yang diprakarsai oleh Wiggins dan Thige. Karakteristik dari capaian pembelajaran adalah terlaksananya pembelajaran yang fleksibel, pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik, serta pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif (Kemdikbud, 2022).

Setelah memahami dengan baik capaian pembelajaran guru kemudian menyusun tujuan pembelajaran (TP). Capaian pembelajaran dalam satu fase akan terdiri dari sejumlah tujuan pembelajaran. Prinsip dalam menyusun tujuan pembelajaran adalah menuangkan tujuan belajar secara operasional dan konkret. Dua komponen utama yang harus ada dalam tujuan pembelajaran adalah kompetensi dan konten materi yang akan dipelajari siswa. Setelah tujuan pembelajaran selama satu fase selesai dirumuskan selanjutnya guru harus menyusun alur tujuan pembelajaran (ATP). ATP disusun untuk satu tahun pelajaran yang isi dan sistematikanya tak jauh berbeda dengan silabus pada kurikulum 2013. Para guru mengaku

berkolaborasi dalam menyusun tujuan pembelajaran dan ATP. Dari tiga teknik yang menjadi alternatif, masing-masing terdapat dua teknik yang dipilih oleh para guru SMA Negeri 1 Tempilang dalam berkolaborasi menyusun tujuan pembelajaran dan ATP. Kedua teknik tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Penyusunan TP dan ATP

Tugas Perencanaan	Teknik yang dilakukan guru
Merumuskan TP	Merumuskan TP berdasarkan CP Merumuskan TP berdasarkan analisis kompetensi dan lingkup materi pada CP
Menyusun ATP	Merancang sendiri berdasarkan CP Mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan pemerintah

Pengejawantahan capaian pembelajaran ke dalam panduan yang bersifat teknis dilakukan dengan cara menyusun modul ajar atau selama ini lebih dikenal dengan istilah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Modul ajar terdiri atas komponen tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, media pembelajaran, serta asesmen awal dan asesmen akhir. Satu modul ajar berisi satu tujuan pembelajaran yang tercantum di dalam ATP. Penyusunan modul ajar bertujuan untuk membantu guru mengajar secara fleksibel dan kontekstual, tidak hanya berpatokan pada buku teks pelajaran. Menurut Rahayu (2020), kelengkapan perangkat pembelajaran yang disiapkan guru akan memudahkan berlangsungnya proses pembelajaran dan tercapainya tujuan pembelajaran. Para guru menyatakan telah menyusun modul ajar sesuai dengan contoh yang telah diberikan pemerintah.

Disamping menyusun perangkat pembelajaran, guru juga menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran (KKTP). KKTP disusun guna mengetahui batas ketercapaian siswa dalam pembelajaran (Kemdikbud, 2022). Ada tiga pendekatan yang disarankan kepada guru dalam menentukan KKTP yaitu menggunakan deskripsi, rubrik, dan interval nilai atau skala. Dalam pendekatan deskripsi, guru menentukan kriteria-kriteria tertentu untuk kemudian mendeteksi kemampuan siswa memadai atau tidak memadai terhadap kriteria tersebut. Siswa yang tidak mencapai kriteria dianggap belum mencapai tujuan pembelajaran. Rubrik digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran misalnya dengan menggunakan gradasi kemampuan mulai dari belum berkembang, layak, cakap, hingga mahir dalam materi yang diajarkan. Pendekatan skala atau interval nilai digunakan dengan menentukan kriteria ketercapaian berdasarkan persentase tertentu. Ketiga pendekatan dalam penentuan KKTP digunakan secara merata oleh guru pada level mata pelajaran.



Gambar 2. Rancangan Perencanaan Pembelajaran oleh Guru

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru memiliki bahan ajar sebagai penunjang materi yang ada di dalam modul ajar dan buku teks pelajaran. Guru juga sudah menggunakan berbagai pendekatan, metode, dan model saat proses pembelajaran berlangsung. Variasi model pembelajaran yang digunakan antara lain *project based learning*, *problem based learning*, *inquiry*, *cooperative learning*, *contextual learning*. Metode yang dipakai juga bervariasi seperti ceramah, diskusi, presentasi, dan demonstrasi. Guru juga mempraktikkan

pembelajaran berdiferensiasi baik dari aspek gaya belajar siswa, konten, dan produk yang dihasilkan. Eggen dan Kauchak dalam Lefudin (2017) mengatakan bahwa teknik mengajar yang bervariasi dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran menjadi ciri sebuah pembelajaran yang efektif.

Para guru juga sudah melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Asesmen diagnostik merupakan bagian dari asesmen formatif. Kurikulum Merdeka menggunakan tiga pendekatan penilaian yaitu *assessment of learning*, *assessment for learning*, dan *assessment as learning*. Dua pendekatan terakhir mengharuskan guru untuk melakukan asesmen formatif termasuk di dalamnya asesmen diagnostik. Kedua penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. *Assessment for learning* memungkinkan guru menggunakan hasil penilaian untuk memperbaiki pembelajaran, sedangkan *assessment as learning* memungkinkan siswa melihat capaian dan kemajuan belajarnya sehingga dapat menentukan target belajar selanjutnya (Kemdikbud, 2017). Penilaian diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan siswa. Hasil asesmen diagnostik digunakan guru untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Firmanzah dan Sudiby (2021) mengungkapkan bahwa asesmen diagnostik membantu guru mendesain pembelajaran pada masa pandemi yang memudahkan peserta didik lebih memahami materi sehingga mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Tahapan yang dilakukan guru dalam menyusun asesmen diagnostik yaitu menganalisis laporan hasil belajar siswa di tahun sebelumnya, mengidentifikasi kompetensi yang akan dipelajari, menyusun instrumen berupa tes tertulis/lisan, keterampilan, atau observasi, menggali informasi mengenai siswa dalam aspek latar belakang keluarga, motivasi, minat, bakat, sarana dan prasarana belajar yang dimiliki, melaksanakan asesmen, dan menjadikan hasil asesmen diagnostik untuk merencanakan pembelajaran sesuai karakteristik dan kebutuhan siswa. Pelaksanaan asesmen diagnostik dapat dilakukan pada awal tahun pelajaran atau pada awal satu materi akan dipelajari (Kurikulummerdeka.com, 2020).



Gambar 3. Kegiatan Penilaian oleh Guru

Hasil asesmen formatif dipakai guru sebagai umpan balik terhadap proses belajar siswa. Kekurangan siswa dapat segera diketahui dan dapat langsung diberikan perbaikannya. Asesmen formatif berguna bagi siswa sebagai refleksi diri dengan melakukan *self assessment* dan *peer assessment*. Selain asesmen formatif, guru melalui kebijakan sekolah juga menyelenggarakan asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan untuk memastikan ketercapaian seluruh tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif dapat dilakukan di akhir proses pembelajaran atau dilakukan sekaligus untuk beberapa tujuan pembelajaran. Berbeda dengan asesmen formatif yang digunakan untuk perbaikan pembelajaran, asesmen sumatif digunakan untuk perhitungan penilaian akhir semester dan akhir tahun pelajaran. Pada tabel berikut ini dapat dilihat pola yang dilakukan guru baik dalam perannya sebagai guru mata pelajaran maupun sebagai wali kelas dalam asesmen



formatif dan asesmen sumatif serta pemanfaatannya sebagai umpan balik bagi siswa, guru, dan orang tua.

Tabel 2. Pola dan Pemanfaatan Asesmen Formatif dan Asesmen Sumatif

Aspek	Kegiatan
	Asesmen Formatif
Pola asesmen formatif	Guru melaksanakan asesmen diagnostik sebelum pembelajaran Guru melakukan penilaian secara mandiri dan melakukan refleksi terhadap hasil penilaian Guru melibatkan peserta didik dalam penilaian (penilaian diri dan penilaian antarteman)
Pemanfaatan asesmen formatif	Guru memberikan umpan balik terhadap tugas-tugas yang diberikan Guru mendiskusikan hasil asesmen dengan siswa serta memberikan masukan/perbaikan Guru menghubungi dan mendiskusikan hasil asesmen siswa yang belum mencapai KKTP bersama orang tua Wali kelas menghubungi dan mendiskusikan bersama orang tua hasil asesmen formatif siswa yang belum mencapai KKTP
	Asesmen Sumatif
Pola asesmen sumatif	Guru melaksanakan ulangan harian, penilaian tengah semester (PTS), penilaian akhir semester (PAS), penilaian akhir tahun (PAT) Guru melaksanakan remedial kepada siswa yang diketahui belum mencapai KKTP sesuai pelaksanaan asesmen sumatif
Pemanfaatan asesmen sumatif	Guru membagikan hasil asesmen sumatif dan memberikan umpan balik kepada siswa Wali kelas mendiskusikan hasil asesmen formatif dan sumatif kepada siswa Wali kelas menyampaikan laporan hasil belajar siswa dalam bentuk rapor PTS dan PAS/PAT kepada orang tua Wali kelas mendiskusikan hasil belajar siswa dalam bentuk rapor PTS dan PAS/PAT bersama orang tua

Dilihat dari aspek pemanfaatan asesmen formatif dan asesmen sumatif, guru berpeluang melakukan perbaikan proses pembelajaran. Begitupun dengan siswa, memiliki kesempatan yang sangat luas untuk memperbaiki capaian pembelajarannya sebelum akhir tahun pelajaran. Pelaksanaan asesmen formatif membantu guru dan siswa untuk sesegera mungkin melakukan refleksi dan perbaikan setelah diketahui ketercapaian pembelajaran terbilang rendah atau belum sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Pelaksanaan remedial di akhir asesmen sumatif memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki hasil belajarnya. Pelaporan hasil belajar secara berkala kepada orang tua juga berperan sebagai bahan refleksi bagi orang tua sehingga upaya motivasi dan bimbingan kepada siswa juga diperankan oleh orang tua di rumah. Berbagai langkah ini dapat mencegah terjadinya risiko retensi kelas. Jika terdapat siswa yang tidak mencapai KKTP dalam mata pelajaran tertentu, Kurikulum Merdeka mengakomodasi penyelesaian ketuntasan tersebut pada jenjang berikutnya baik pada fase yang sama maupun pada fase yang berbeda. Permendikbud No. 21 tahun 2022 tentang standar penilaian masih memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menetapkan kriteria kenaikan kelas. Satuan pendidikan tetap diberi keleluasaan dalam



menentukan kebijakan kenaikan kelas. Namun, implementasi Kurikulum Merdeka lebih menekankan pada perbaikan di sepanjang proses pembelajaran. Dengan begitu, retensi kelas dapat dihindari. Kriteria kenaikan kelas yang ditetapkan oleh SMA Negeri 1 Tempilang menyesuaikan dengan kebijakan yang ada di dalam Kurikulum Merdeka. Di antaranya tidak lagi menetapkan jumlah maksimal mata pelajaran yang tidak tuntas sebagai syarat agar bisa naik kelas berikutnya seperti terdapat pada Kurikulum 2013. Kriteria kenaikan kelas SMA Negeri 1 Tempilang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Kriteria Kenaikan Kelas SMA Negeri 1 Tempilang

No.	Kriteria Kenaikan Kelas
1.	Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti
2.	Mengikuti kegiatan penilaian formatif dan sumatif
3.	Memiliki deskripsi sikap minimal baik
4.	Memiliki presentase kehadiran minimal 85%

Pada akhir tahun pelajaran 2021/2022 diketahui tidak terdapat siswa SMA Negeri 1 Tempilang yang harus menyelesaikan ketercapaian pembelajaran di level berikutnya. Tidak didapati pula siswa yang mengulang kelas. Seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Tempilang dinyatakan naik ke kelas XI. Selain ketercapaian pembelajaran, hal yang perlu mendapat perhatian penting dari para guru terutama yang mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas adalah kehadiran siswa. Sebaik apapun perencanaan pembelajaran yang dirancang guru, tidak akan memberikan banyak manfaat jika siswa tidak hadir ke sekolah. Wali kelas mengungkapkan telah menerapkan pengecekan secara rutin terhadap kehadiran siswa. Perlakuan dan pelayanan khusus diberikan kepada siswa yang diketahui memiliki masalah dalam kehadiran. Tindak lanjut terhadap siswa yang sering tidak hadir ke sekolah sudah seharusnya tidak ditunda-tunda sehingga menyebabkan terjadinya akumulasi selama satu semester atau satu tahun ajaran yang tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap capaian belajar siswa (Jacob and Mantiri, 2022). Wali kelas mengaku melakukan berbagai tahapan prosedur dalam mengatasi siswa yang sering tidak hadir ke sekolah. Pertama, dengan memanggil langsung siswa yang bersangkutan dan mengajak berdiskusi untuk mencari solusi. Jika masih terjadi pengulangan, wali kelas akan melakukan pemanggilan terhadap orang tua guna mengetahui dan mendiskusikan sebab-sebab dan solusi yang tepat untuk masalah terjadi pada siswa. Kerja sama guru dengan orang tua untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dialami siswa adalah sebuah kewajaran. Ornstein et al. (2011) menegaskan bahwa prestasi belajar siswa di sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan rumah dan keluarga. Karena itu, melibatkan orang tua dalam menyelesaikan masalah siswa adalah sebuah keniscayaan. Selain bekerja sama dengan orang tua, wali kelas juga idealnya berkoordinasi dengan guru BK untuk menyelesaikan siswa yang sering tidak hadir ke sekolah. Namun, hal ini tidak dapat maksimal dilakukan di SMA Negeri 1 Tempilang karena saat ini masih belum ada guru BK yang bertugas. Kebijakan yang diambil sekolah menetapkan koordinasi wali kelas dilakukan langsung kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Hanya sebagian kecil wali kelas yang lanjut ke tahap melibatkan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dalam mengatasi masalah ini. Bekerja sama dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan adalah tahap lanjutan yang ditempuh wali kelas jika siswa masih melakukan pengulangan dalam masalah ketidakhadiran setelah dilalui tahapan berdiskusi dengan orang tua.

Sebagai bentuk pengawasan dalam kegiatan perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, SMA Negeri 1 Tempilang melaksanakan kegiatan supervisi baik terhadap dokumen perangkat pembelajaran maupun pelaksanaan pembelajaran di kelas.



Supervisi dengan kunjungan ke kelas dilakukan langsung oleh kepala sekolah kepada setiap guru mata pelajaran minimal satu kali dalam satu semester. Dalam kunjungan kelas ini, SMA Negeri 1 Tempilang mengadopsi prinsip *lesson study (plan-do-see)* sehingga dalam supervisi kelas tidak hanya kepala sekolah yang masuk ke kelas, tetapi melibatkan guru lain sebagai pengamat sebanyak dua orang. Selain bertugas mengamati, para guru ini juga difungsikan untuk mempelajari metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru yang disupervisi sehingga dapat meniru hal-hal baik dan efektif yang dilakukan. Melalui pola supervisi semacam ini, para guru juga dapat melakukan refleksi dan evaluasi dengan saling memberi saran dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran (Abizar, 2017). Sementara itu, supervisi dan validasi terhadap perangkat pembelajaran dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Di awal semester genap tahun pelajaran 2022/2023, verifikasi dan validasi perangkat pembelajaran dilakukan dengan melibatkan pengawas sekolah serta fasilitator sekolah penggerak, BPMP.



Gambar 4. Alur Kegiatan Supervisi

Disamping menjalankan serangkaian kegiatan perencanaan, pembelajaran, dan penilaian serta pengawasan dalam pelaksanaannya sesuai prosedur yang ditetapkan, SMA Negeri 1 Tempilang juga rutin melakukan pelatihan dan workshop bagi guru untuk menunjang pengimplementasian Kurikulum Merdeka secara baik. Pada tahun 2022 workshop yang dilakukan secara mandiri sebanyak 2 kali dan di tahun 2023 ditargetkan sebanyak 5 kali workshop dan pelatihan. Pemateri didatangkan dari berbagai komponen mulai dari guru-guru yang kompeten dan pengajar praktik pada program guru penggerak. Sehubungan dengan statusnya sebagai sekolah penggerak, SMA Negeri 1 Tempilang juga rutin memperoleh pendampingan dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Guru Penggerak (BGP). Di setiap akhir bulan dilakukan rapat bersama untuk membahas isu-isu penting seputar pengimplementasian Kurikulum Merdeka dan di setiap akhir tahun digelar rapat evaluasi dan refleksi. Hal ini diakui sangat bermanfaat bagi sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara tepat.

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan temuan penelitian ini bahwa penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah dapat mengatasi masalah retensi kelas. Keberhasilan kebijakan menghindari retensi kelas dalam Kurikulum Merdeka sangat bertumpu pada terrealisasinya perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian pembelajaran yang berkualitas dan bermakna serta mengutamakan prinsip-prinsip penting dalam Kurikulum Merdeka. Pengimplementasian kurikulum harus dilakukan dengan merujuk pada berbagai peraturan, petunjuk dan panduan pelaksanaan Kurikulum Merdeka baik dari segi perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, maupun penilaian. Guru harus memahami dengan baik konsep dan konten dalam Kurikulum Merdeka sehingga bisa menyusun perencanaan pembelajaran yang tepat sehingga dapat melaksanakan pembelajaran dan penilaian yang tepat pula. Oleh



sebab itu, pelatihan dan bimbingan kepada guru harus dilakukan secara berkelanjutan. Kolaborasi di antara para guru juga dibutuhkan untuk merealisasikan kegiatan perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

Peran aktif seluruh komponen pendidikan sangat dibutuhkan. Kepala sekolah harus menyusun kebijakan strategis untuk memastikan bahwa seluruh guru memiliki pemahaman dan kemampuan yang baik dalam menerapkan kurikulum. Orang tua harus dilibatkan secara aktif terhadap proses perkembangan akademik dan sikap siswa. Siswa harus mendapat kesempatan yang luas untuk belajar sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhannya. Peran lembaga semacam BPMP dan BGP harus dapat dioptimalkan dalam memberikan pendampingan kepada sekolah dan para guru.

Ketidaktercapaian siswa dalam satu tujuan pembelajaran harus sesegera mungkin mendapat perbaikan dan penyelesaian di sepanjang proses pembelajaran. Perbaikan tidak menunggu akumulasi ketidaktercapaian siswa dalam jangka waktu tertentu. Hal penting lain yang harus menjadi perhatian guru adalah bahwa keputusan menaikkan siswa ke jenjang berikutnya baik tanpa catatan perbaikan maupun dengan catatan perbaikan telah melalui proses dan tahapan sesuai prosedur yang ditetapkan. Terutama, dengan melakukan asesmen formatif dan sumatif yang disertai dengan umpan balik sebagai langkah perbaikan selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan begitu, kenaikan kelas bukan merupakan 'hadiah' atau 'pemberian' sehingga kualitas pendidikan dan *output* yang dihasilkan akan tetap terjamin.

Saran

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi sekolah-sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2022/2023 dan seterusnya. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab terlaksananya kurikulum di tingkat satuan pendidikan perlu menyiapkan kebijakan strategis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Para guru harus dapat dipastikan memiliki kompetensi dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Kegiatan pelatihan dan workshop implementasi Kurikulum Merdeka bagi guru harus dapat difasilitasi sekolah. Oleh sebab itu, kerja sama dengan lembaga terkait di antaranya Balai Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP) harus dapat dilakukan secara optimal. Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab penerapan kurikulum di daerah harus dapat memastikan bahwa sosialisasi berbagai peraturan, petunjuk, dan panduan pelaksanaan Kurikulum Merdeka harus sampai pada semua level komponen pendidikan meliputi kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa.

Daftar Pustaka

- Abizar, Haris. (2017). *Buku Master Lesson Study*. Yogyakarta: Diva Press.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Ardianti, Yekti dan Nur Amalia. (2022). Kurikulum Merdeka: Pemaknaan Merdeka dalam Perencanaan Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 6(3), 399-407
- Ariga, Selamat. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Pasca Pandemi Covid-19 Implementasi Kurikulum Merdeka Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 662-670



- Asesmen Diagnostik Kurikulum Merdeka, Bagaimana Cara Menyusunnya? Diakses pada 5 Maret, (2023), dari Kurikulum Merdeka Website: <https://kurikulummerdeka.com/asesmen-diagnostik-kurikulum-merdeka-bagaimana-cara-menyusunnya/>
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen: Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah*. Jakarta: Kemdikbud.
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Barlian, Ujang Cepi. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Journal of Educational and Language Research*, 1(12)
- Damayanti, G., & Muhroji, M. (2022). The Difficulties of Elementary School Teacher in Developing Thematic Learning Tools for the Merdeka Curriculum. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 8(3), 703-715
- Deak, Victor et al. (2022). Implementasi Pembelajaran Kampus Mandiri dalam Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)*, 1(5), 1113-1128
- Direktorat Pendidikan Menengah Atas Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas*. Jakarta: Kemdikbud.
- Duh! Masih Banyak Siswa Sekolah di RI Gak Naik Kelas. Diakses pada 25 Februari, (2023), dari *CNBC Indonesia* Website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200403123446-4-149604/duh-masih-banyak-siswa-sekolah-di-ri-gak-naik-kelas>
- Eren, O., Lovenheim, M. F., & Mocan, H. N. (2022). The Effect of Grade Retention on Adult Crime: Evidence from a Test-Based Promotion Policy. *Journal of Labor Economics*, 40(2), 361-395
- Fahmi, Agus et al. (2022). Strategi Peningkatan Mutu Melalui Kurikulum Merdeka di Perguruan Tinggi Swasta (Descriptive Study di Prodi Manajemen UNDIKMA). *Jurnal Teknologi Pendidikan: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pembelajaran*, 7(2), 168-175
- Fitrah, Muh., & Luthfiah. (2017). *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Firmanzah, Diki dan Elok Sudibyo (2021). Implementasi Asesmen Diagnostik dalam Pembelajaran IPA Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMP/MTS Wilayah Menganti, Gresi. *Pensa e-Jurnal: Pendidikan Sains*, 9(2), 165-170
- Fruehwirth, J. C., Navarro, S., & Takahashi, Y. (2016). How the timing of grade retention affects outcomes: Identification and estimation of time-varying treatment effects. *Journal of Labor Economics*, 34(4), 979-1021
- González-Betancor, S. M., & López-Puig, A. J. (2016). Grade retention in primary education is associated with quarter of birth and socioeconomic status. *PLoS ONE*, 11(11), 1-19



- Hughes, J. N., West, S. G., Kim, H., & Bauer, S. S. (2018). Effect of early grade retention on school completion: A prospective study. *Journal of Educational Psychology*, 110(7), 974–991
- Isa et al. (2022). Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *JURNAL BASICEDU*, 6(6), 9947-9957
- Jacobs, J., & Mantiri, O. (2022). Grade Retention and Social Promotion Dichotomy: A Theoretical and Conceptual Analysis. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 3(2), 226-233
- Jimerson, Shane. (2001). Meta-analysis of Grade Retention Research: Implications for Practice in the 21st Century. *School Psychology Review*, 30, 420-437
- Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud. Diakses pada 25 Februari, (2023), dari Kemdikbud Website: <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=download>
- Kurikulum Prototipe Menjadi Kurikulum Merdeka. Diakses pada 5 Maret, (2023), dari *Republika* Website: <https://news.republika.co.id/berita/r74zd4380/kurikulum-prototipe-menjadi-kurikulum-merdeka>
- Lefudin. (2017). *Belajar dan Pembelajaran: Dilengkapi dengan Model Pembelajaran, Strategi Pembelajaran, Pendekatan Pembelajaran, dan Metode Pembelajaran*. Yogyakarta: Deepublish.
- Leny, Lince. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Motivasi Belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan. *Prosiding Sentikjar*, 1(1)
- Levin, B. (2007). The Failure of Failure. *Phi Delta Kappan*, 89(3), 234–235
- Maghfiroh, Nailyl dan Muhammad Sholeh. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Menghadapi Era Disrupsi dan Era Society 5.0. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 09(05), 1185-1196
- Mardianah. (2021). Strategi Kepala Madrasah dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin. *Journal of Innovation in Teaching and Instructional Media*, 2(1), 15-20
- Ornstein, Alan C. et al. (2011). *Foundations of Education*. USA: Wadsworth.
- Owings, W. A., & Magliaro, S. (1998). Grade retention: A history of failure. *In Educational Leadership*, 56(1), 86–88
- Parker, D. R. (2001). Social Promotion or Retention? Two Wrongs Don't Make a Right. *Leadership*, 30(4), 12-14
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
- Pusat Informasi Guru Kemdikbud. Diakses pada 3 Maret, (2023), dari Pusat Informasi Guru Kemdikbud Website: <https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/en-us/sections/14142620530585-Garis-Besar-Kurikulum-Merdeka>
- Qolbiyah, Aini. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 1(1), 44-48
- Rahayu, Galih Dani Septiyan. (2020). *Mudah Menyusun Perangkat Pembelajaran*. Purwakarta: CV Tre Alea Jacta Pedagogie.
- Rifma. (2016). *Optimalisasi Pembinaan Kompetensi Pedagogik Guru*. Jakarta: Kencana.
- Sudah 2500 Sekolah Terapkan Kurikulum Prototipe. Diakses pada 7 Maret, (2023), dari Kompas Website:



<https://www.kompas.com/edu/read/2022/01/19/130224371/sudah-2500-sekolah-terapkan-kurikulum-prototipe>

- Utami, Wikan Budi et al. (2022). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila. *Wacana Akademika: Majalah Ilmiah Kependidikan*, 6(3), 285-294
- Vidieyanti, Nadia et al. (2022). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Pasca Covid-19 dengan Pengimplementasian Kurikulum Merdeka. *Jurnal Satya-Sastraharing*, 6(2), 100-108
- Winarni, Endang Widi. (2018). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Witmer, S. M., Hoffman, L. M., & Nottis, K. E. (2004). Elementary Teachers' Beliefs and Knowledge about Grade Retention: How Do We Know What They Know? *Education*, 125(2), 173
- Zhang, S., & Huang, A. (2022). The Long-Term Effects of Automatic Grade Promotion on Child Development, *China Economic Review*, 74(C)